

## **Pemerintah Siap Wujudkan Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Dunia**



### **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **SIARAN PERS**

HM.4.6/440/SET.M.EKON.3/11/2021

### **Pemerintah Siap Wujudkan Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Dunia** **Jakarta, 30 November 2021**

Dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020. Meski begitu, ekonomi syariah mampu menunjukkan kinerja yang baik. Sektor pertanian dan makanan halal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Rapat Pleno Perdana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/11). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektoral sehingga dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Rapat pleno ini dalam rangka menyatukan langkah untuk tercapainya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” tutur Wapres Ma'ruf Amin pada konferensi pers yang digelar usai rapat pleno.

Berdasarkan data pada *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*, secara umum ekonomi syariah Indonesia berada pada posisi ke empat, yakni naik 1 peringkat dari laporan tahun 2019/2020. Dengan total aset keuangan syariah Indonesia mencapai US\$99 miliar, Indonesia menjadi negara ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia.

Sementara, data pada *Islamic Finance Development Report 2020*, secara umum nilai *Islamic Finance Development Indicator Indonesia* berada pada posisi kedua. Kemudian peringkat kategori *halal food* Indonesia berada pada posisi 4, *fashion* di posisi 3, *media dan rekreasi* di posisi 5, *muslim friendly travel* di

posisi 6, kosmetik dan farmasi di posisi 6, serta *Islamic Finance* juga di posisi 6.

Namun, apabila melihat *share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional, dapat dikatakan masih relatif rendah. Pada Juli 2021, *share asset* perbankan syariah terhadap total *asset* perbankan hanya 4,41%, *share* dana pihak ketiga sebesar 4,89%, dan pembiayaan sebesar 4,54%.

“Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting di mana kontraksi sektor di tahun 2020 lebih rendah daripada ekonomi nasional, jadi kontraksinya hanya sebesar -1,75% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,07%,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi penguatan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui inovasi produk, pendalaman pasar dan pembangunan infrastruktur, penguatan *halal value chain*, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola, penguatan ekonomi digital, dan penguatan literasi sumber daya manusia, riset dan pengembangan.

Pemerintah juga mendorong beberapa kebijakan guna mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Pertama, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan dengan menciptakan ekosistem ekonomi keuangan syariah yang baik melalui peningkatan sisi *supply* yang sejalan dengan sisi *demand*, yang didukung infrastruktur ekosistem.

Dari sisi *supply* terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu klaster industri halal, klaster keuangan komersil, klaster keuangan sosial, dan klaster komunitas. Sedangkan sisi *demand* berasal dari domestik maupun global. Infrastruktur ekosistem berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas pada sisi *supply* dan *demand*.

Selanjutnya, pengembangan UMKM Syariah dengan program kemitraan dengan perusahaan besar (korporasi), seperti pendampingan korporasi terhadap UMKM atau UMKM sebagai pemasok/sub-kontraktor perusahaan besar serta peningkatan peranan UMKM Syariah dalam *global value chain*.

Kemudian, mengingat masih rendahnya Inklusi Keuangan Syariah maka diperlukan percepatan program, antara lain Kredit Usaha Rakyat Syariah, Bank Wakaf Mikro, pemanfaatan keuangan digital, dan inklusi keuangan bagi pemuda/pelajar/santri pondok pesantren.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong pembangunan ekosistem dan kawasan industri halal. Industri halal merupakan bagian terpenting dalam ekosistem ekonomi syariah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap neraca perdagangan dengan menghadirkan produk-produk halal yang berdaya saing secara nasional dan global.

Dalam pengembangan industri halal diperlukan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, dan sarana infrastruktur pendukung lainnya, untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan halal.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan rantai nilai halal, pengembangan standar halal/*Halal Assurance System (HAS)* yang komprehensif sebagai infrastruktur non fisik, perlu dilakukan untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional, terutama untuk sektor-sektor utama industri halal.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo. (map/fsr)

\*\*\*

**Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Haryo Limanseto**

Website: [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI

Email: [humas@ekon.go.id](mailto:humas@ekon.go.id)

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia